

Bukan TNI, Tapi Pasukan Perang yang Ditolak

Oleh: **Anton Camnahas**



Dosen STFK
Ledalero-Maumere

Selama minggu lalu, *Pos Kupang* menurunkan beberapa laporan mengenai aksi penolakan masyarakat di Timor Tengah Utara (TTU) terhadap rencana TNI untuk membangun Batalyon Infanteri (Yonif) 746 dan satu Kompi Kavaleri (Kikav) Tank di TTU. Aksi penolakan seperti ini bukan baru saja terjadi. Sudah selama setahun ini, suara penolakan datang dari mana-mana. Namun TNI tetap maju terus dengan rencananya. Sejauh ini, TNI sebenarnya sudah punya rencana untuk membangun markas militer, bukan hanya di TTU tetapi juga di tiga kabupaten lain di Timor Barat: Kupang, TTS dan Belu (bdk. <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7879>, diakses 10 Mei 2009). Rupanya rencana tersebut belum diketahui baik oleh masyarakat di ketiga kabupaten selain TTU. Patut diakui bahwa sebagai satu lembaga penting negara, adalah sah-sah saja jika TNI memiliki rencana terkait pengawalan negara. Semua orang tahu bahwa suatu Negara berdaulat membutuhkan tentara. Namun mengapa rencana TNI tersebut justru mendapat perlawanan sengit bahkan ditolak oleh rakyatnya sendiri? Apa kiranya yang menjadi alasan di balik arus penolakan tersebut?

Bukan TNI tetapi Pasukan Perang

Dalam sidang dengar pendapat waktu lalu (Rabu, 10/6), Dandim TTU, Letkol (Inf) HM Sinaga menegaskan bahwa persoalan pertahanan negara mesti dibangun jauh sebelum ada ancaman perang, “Bukan tunggu musuh datang menyerang, baru kita semua lari pontang-panting.” (*PK*, 11/6). Pernyataan seperti ini memberi kesan seolah-olah di Timor Barat tidak ada tentara sama sekali. Juga ada kesan peremehan terhadap kemampuan tentara yang sudah ada sampai sekarang di Timor Barat: satu Korem, sejumlah besar Kodim, Koramil, Babinsa ditambah lagi pasukan penjaga perbatasan. Lalu bicara soal musuh, kita bertanya, musuh kita itu siapa? Saya harap pernyataan dari seorang petinggi TNI seperti ini tidak disalahmengerti seolah-olah TNI selalu hidup dalam rasa permusuhan dengan pihak lain. Lebih kurang bagus lagi kalau pernyataan ini memberi kesan mereka hidup dalam bayangan ketakutan mereka sendiri yang belum terbukti kebenarannya.

Menurut kami, yang ingin diketahui masyarakat sekarang adalah alasan yang meyakinkan mengapa TTU dan wilayah lain di Timor Barat mesti dikawal oleh pasukan perang (baca: batalyon) demikian banyak? Kalau isu perbatasan yang menjadi masalah, sejauh ini, pintu perbatasan RI-Timor Leste dijaga oleh 1000 personel TNI dibantu oleh satuan teritorial setempat (bdk.

<http://www.detikhot.com/index.php/mobile.read/tahun/2007/bulan/05/tgl/28/time/155736/idnews/786131/idkanal/10>). Data ini diambil tahun 2007 yang lalu. Sekarang mungkin jumlah tentara di perbatasan sudah lebih banyak dari sebelumnya. Dengan demikian jelas bahwa reaksi penolakan yang terjadi selama ini hendaknya tidak dimengerti sebagai penolakan masyarakat Timor Barat terhadap TNI di sana. Yang menjadi persoalan yaitu masyarakat belum mengerti mengapa jumlah tentara yang sudah demikian banyak di Timor Barat mesti ditambah lagi dengan beberapa batalyon di empat kabupaten sekaligus. Apakah jumlah yang sudah ada belum memadai? Kalau batas sudah dijaga begitu ketat, lalu rakyat yang hidup di dalam wilayah yang dijaga itu juga sendiri “dijaga,” tentu saja ruang gerak mereka menjadi semakin sempit. Apakah Timor Barat sedang dalam suasana perang sehingga memerlukan pasukan dalam jumlah banyak? Pertanyaan inilah yang sampai sekarang belum dijawab secara meyakinkan oleh pihak TNI.

Kesamaan Budaya

Selain alasan jumlah tentara yang sudah terlalu banyak, tentu saja masih ada banyak alasan lain yang juga patut dipertimbangkan lebih jauh. Masyarakat Timor Barat sebenarnya tidak memerlukan kehadiran TNI dalam jumlah besar, sebab kondisi keamanan di sana sangat kondusif. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat Timor Barat dan Timor Leste memiliki latar belakang sejarah, ikatan kekeluargaan dan budaya yang amat erat. Dengan demikian, kekuatiran akan adanya agresi militer dari negara tetangga, khususnya dari Timor Leste, tidak cukup riil. Kalau Timor Leste, yang adalah sebuah negara kecil, takut dengan Indonesia, masih bisa dimengerti. Satu negara besar seperti Indonesia, takut dengan Timor Leste, apalagi satu distrik kecil seperti Oecusse, adalah sesuatu yang lucu. Apakah logika berpikir seperti ini masuk di akal sehat? Australia sendiri sejauh ini menjalin hubungan baik dengan pemerintah Indonesia. Dengan demikian, kecemasan akan ancaman keamanan dari negara-negara tetangga (Timor Leste dan Australia) seperti dihembuskan selama ini tidak punya dasar sama sekali. Tidak setiap negara tetangga adalah musuh. Siapa mereka bagi kita amat bergantung pada bagaimana kita memandang mereka. Lebih baik kita berusaha membina persaudaraan dengan negara tetangga daripada menciptakan peluang untuk bertikai. Cara terbaik untuk mencegah permusuhan adalah mencari teman sebanyak-banyaknya, bukan memperbesar jumlah musuh. Dengan demikian, pendekatan militer dalam soal pertahanan dan keamanan bukanlah satu-satunya model pendekatan yang paling baik. Semoga pengalaman kegagalan pendekatan militer di daerah-daerah, seperti: Aceh, ex-Timor-Timur, Ambon, Poso dan Papua membuka mata kita untuk memikirkan alternatif baru dalam penanganan pertahanan dan keamanan negara.

Kalau kita mau realistis, ancaman terbesar yang mestinya diwaspadai TNI saat ini bukanlah ancaman di wilayah darat melainkan di wilayah laut. Wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari laut belum dikawal secara optimal, bahkan terkesan ditelantarkan. Banyak sekali kapal asing yang menangkap ikan dan mengambil kekayaan kita *pro deo*. Lebih baik TNI memfokuskan perhatian ke laut untuk mengamankan kekayaan di perairan kita daripada menambah jumlah pasukan perang TNI Angkatan Darat di daratan pulau Timor. Persoalan Ambalat yang masih terus menghantui kita sampai sekarang bisa diangkat sebagai salah satu contoh kasus lemahnya sistem pertahanan kita di wilayah laut.

Sikap Demokratis dan Isu Ekonomi

Dalam iklim demokratisasi dewasa ini keputusan untuk menghadirkan tentara dalam jumlah banyak sebaiknya tidak diambil secara sepihak. Untuk maksud ini diperlukan suatu diskursus yang lebih komprehensif sampai ke lapisan masyarakat paling bawah. Rakyat seharusnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Hal ini penting sebab tanpa diskursus yang baik, kehadiran tentara terkesan dipaksakan sambil mengangkangi aspirasi masyarakat banyak. Perlu disadari pula

bahwa suara persetujuan rakyat tidak bisa direduksi hanya pada suara persetujuan beberapa wakil rakyat, tokoh adat, dan pejabat pemerintah. Dengan ini mau dikatakan bahwa maksud baik TNI untuk meningkatkan ketahanan negara mesti didukung dengan cara-cara pendekatan dan proses pembahasan yang lebih santun. Jangan lupa, tidak semua orang dalam masyarakat itu anggota TNI sehingga bisa diatur berdasarkan prinsip garis komando dari atas ke bawah. Apa pun alasannya, kehadiran TNI dalam jumlah banyak sebaiknya bukan menjadi urusan segelintir orang saja, tetapi urusan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting diperhatikan karena akan berdampak secara langsung pada kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya seluruh masyarakat bersangkutan.

Sesuai dengan rencana terakhir TNI, luas lahan yang dibutuhkan bagi pembangunan markas tentara di Timor Barat amat besar, meliputi: 430 ha di Kabupaten Kupang [PK, 29/8/2007, p. 7], ± 80 ha di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) [PK, 2/2/2009, p. 15], ± 20,7 ha di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) [PK, 6/7/2007, p. 8], belum terhitung luas lahan yang dibutuhkan di Kabupaten Belu. Kenyataan ini dengan sendirinya akan mengurangi lahan pertanian dan peternakan masyarakat. Hal ini akan berdampak secara langsung pada keadaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar adalah petani dan peternak. Dengan demikian, isu perkembangan ekonomi yang diusung bersamaan dengan promosi menghadirkan markas militer di Timor Barat layak untuk dipertanyakan. Apa betul yang untung secara ekonomis itu adalah rakyat kebanyakan ataukah cuma TNI dan para pendukungnya alias segelintir orang saja?

Gagal Sidang

Hari Senin (8/6) yang lalu, setelah massa demonstran bersuara keras, akhirnya beberapa (17) anggota DPRD TTU mau mengakomodir suara mereka. Dan karena itu mereka berjanji untuk melaksanakan sidang paripurna Rabu (10/6) untuk membahas masalah tersebut. Sidang paripurna yang diharapkan tersebut ternyata tidak jadi digelar (bdk. PK, 11/6). Yang dibuat oleh DPRD TTU hanyalah sidang dengar pendapat (*hearing*), persis seperti dugaan Viktor Manbait dari Lakmas sehari sebelumnya. Sayang bahwa sidang itu baru terjadi kemarin (Rabu, 10/6), setelah hampir setahun rakyat menyuarkan pendapatnya. Teriakan rakyat bagaikan di tengah padang gurun tak berpenghuni. Kami bertanya, selama ini DPRD TTU ada di mana? Mengapa sidang dengar pendapat itu baru terjadi Rabu (10/6)? Itu juga hanya karena para demonstran memaksa lembaga rakyat tersebut untuk mendengarkan aspirasi mereka. Kalau DPRD TTU tanggap terhadap situasi, mestinya mereka sudah memanggil sidang dengar pendapat tersebut jauh-jauh hari sebelumnya guna mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Dengan demikian, ketika suara penolakan masyarakat semakin gencar, sidang paripurna bisa digelar pada waktunya untuk mengambil sikap politis yang pantas. Sidang dengar pendapat terakhir, dengan demikian, memberi kesan kuat bahwa, maaf, lembaga DPRD TTU memang belum tahu apa persoalan serius dalam masyarakatnya akhir-akhir ini. Ini satu lembaga rakyat yang tidak tahu tentang situasi rakyatnya sendiri. (Ataukah para anggota dewan yang terhormat itu pura-pura tidak tahu?) Semoga para wakil rakyat lebih terbuka mata dan telinganya, tetapi terlebih hatinya, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat banyak.

Sumber: Pos Kupang, *Opini*, Selasa, 16 Juni 2009, p. 4.